



Analisis Partisipasi Dan Sikap Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Presiden 2019 Di Kabupaten Bangkalan

Abdullahdil Hanani¹

Pendidikan PKn, STKIP PGRI Bangkalan
hanani99@gmail.com

Sunardjo²

Pendidikan PKn, STKIP PGRI Bangkalan
sunardjo@stkipgri-bkl.ac.id

Anindita Trinura Novitasari³

Pendidikan PKn, STKIP PGRI Bangkalan
aninditatrinnura2015@stkipgri-bkl.ac.id

Abstract

The presidential election is a form of democratic party in a country to elect a head of state who will carry out state policies within a period of leadership which must be held accountable to the people. Presidential Elections in Indonesia are carried out based on the principle of direct, general, free and confidential (Luber), Honest and Fair (Jurdil). The people choose directly who will be the head of state (President and Vice President). (1945 Constitution concerning presidential elections and terms of office for president and vice president). Political Participation Is Determination of the attitude of participation or involvement and role of an Individual, so that in the end ting is to give the right to vote for one of the presidential candidates to participate in determining the head of state (president) in the next five years, and also to avoid abstentions. encourages the individual to support and vote during the presidential election, Participation supports here in the form of participating and involved in campaigning, and voicing the vision and mission of one of the candidates in the presidential election While participating in vo Political attitude is an attitude that gives an individual voice in determining a leader, which is absolutely essential for the community to give rights as regulated in the 1945 law in articles 27ayat (1) and (2); article 28, article 28D paragraph (3), article 28E paragraph (3). In this law it is emphasized that the State must fulfill the rights of its citizens, especially in democratic parties, especially in the presidential election, whose leadership holds office for one period (five years).

Keywords: Participation, Political Attitudes, Presidential Elections.

Abstrak

Pemilihan presiden merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi di suatu negara untuk memilih kepala negara yang akan menjalankan kebijakan negara dalam satu periode kepemimpinannya yang nantinya harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Pemilihan Presiden di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung,



umum, bebas dan rahasia (Luber), Jujur dan Adil (Jurdil). Rakyat memilih langsung siapa yang akan menjadi kepala negara (Presiden dan Wakil Presiden). (UUD 1945 Tentang pemilihan presiden dan masa jabatan presiden dan wakil presiden). Partisipasi Politik Adalah Penentuan sikap keikutsertaan atau keterlibatan dan peran seorang Individu, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut mendukung dan memilih pada saat pemilihan presiden berlangsung, Partisipasi mendukung disini berupa ikut serta dan terlibat dalam berkampanye, serta menyuarakan visi-misi salah satu kandidat dalam pemilihan presiden, Sementara Partisipasi memilih adalah memberikan hak suaranya terhadap salah satu calon presiden untuk ikut menentukan kepala Negara (presiden) dalam lima tahun kedepan, dan juga agar terhindar dari sikap golput. Sikap politik adalah sikap yang memberikan suara individu dalam menentukan seorang pemimpin, yang mana hal ini mutlak bagi masyarakat untuk memberikan hak seperti halnya yang diatur dalam undang-undang 1945 dalam pasal 27 ayat (1) dan (2); pasal 28, pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3). Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa Negara harus memenuhi hak asasi warga negaranya, khususnya dalam pesta demokrasi, terutama dalam pemilihan presiden, yang kepemimpinannya, menjabat selama satu periode (lima tahun).

Kata Kunci: Partisipasi, Sikap Politik, Pemilihan Presiden.

I. Pendahuluan

Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum, sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan dengan ikut mendukung dan memilih pemimpin.

Dalam pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada calon atau pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan dalam melaksanakan pemilu selanjutnya. (Liando, 2016).

Perlunya untuk keikutsertaan dan peran aktif masyarakat dalam memilih, oleh karena itu upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat (Liando, 2016). Menyatakan hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan. Argumentasi dan analisis artinya lahir lahir berbasis pada, metodologi atau kerangka pikir yang tepat untuk memahami dinamika partisipasi politik, serta kedua, didasari dengan kepekaan yang kuat terhadap dinamika-dinamika yang berkembang dalam wilayah ekonomi, administrasi, politik, serta sosial dan kultural. Di negara yang menganut



paham demokrasi, pemikiran yang mendasari partisipasi politik sangat diperlukan untuk menentukan pemimpin yang nantinya akan berpengaruh terhadap negara.

Konsep Partisipasi politik adalah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh rakyat secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan. Partisipasi politik merupakan aspek yang sangat penting dan merupakan ciri khas adanya modernisasi politik di negara yang kehidupan masyarakatnya masih tergolong tradisional dan sifat kepemimpinan politiknya ditentukan oleh segolongan elit penguasa, maka partisipasi warganegara dalam ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara relatif sangat rendah. Sementara itu di negara yang proses modernisasi politiknya telah berjalan baik, maka tingkat partisipasi politik warganegara cenderung meningkat. Maka demikian partisipasi politik sangat diperlukan untuk kemajuan sebuah negara demokrasi seperti halnya negara Indonesia ini sebagai negara demokrasi (Mudjiyanto, 2012).

Indonesia merupakan salah satu negara penganut paham demokrasi, partisipasi warga negara senantiasa ditumbuh kembangkan dalam segala aspek kehidupan karena program pembangunan akan berhasil jika didukung oleh partisipasi warga negara yang makin meluas. Untuk itu pembangunan politik di Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas pendidikan politik, memantapkan etika dan moral budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa, yaitu pancasila, dan meningkatkan pengetahuan dan wawasan warga negara tentang berbagai kewajiban dan haknya sehingga mereka mampu dan mau berperan aktif dalam kegiatan politik (Mudjiyanto, 2012).

Partisipasi masyarakat dalam memilih presiden ditentukan dengan adanya Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Perubahan yang terjadi mengikut kepada undang-undang dasar tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala daerah. Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka undang-undang tersebut telah memberikan hak politik rakyat untuk memilih gubernur dan bupati atau walikotanya secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional terbuka lebar.

Pemilihan Presiden merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi di suatu negara untuk memilih kepala negara yang akan menjalankan kebijakan negara dalam satu periode kepemimpinannya yang nantinya harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat. Pemilihan presiden di Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). Rakyat memilih langsung siapa yang akan menjadi kepala negara (Pratama, 2015). Dalam hal ini rakyat menentukan pemimpin selama satu periode yang diatur.

Dalam Amandemen pertama pasal 7 (UUD 1945) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pola-pola kekuasaan sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru dapat dielakkan sehingga pembangunan kehidupan bermasyarakat lebih terbuka (Pratama, 2015). Dalam hal ini saya akan mengulas sedikit tentang Fenomena yang saya analisis



dalam penelitian pemilihan presiden ini antara lain: sebagian besar masyarakat Bangkalan menentukan sikap memilih dalam menentukan pemimpin pada pemilihan presiden, Dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) secara bersamaan, terbuka, dan rahasia, di kabupaten Bangkalan, yang akan dilangsungkan pada tanggal 17 April 2019 nanti.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi dalam partisipasi politik. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam berpartisipasi politik (Hendrik, 2008). Pentingnya partisipasi politik akan berpengaruh terhadap jalannya proses demokrasi, sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan presiden merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi demi kedaulatan rakyat (Hendrik, 2008). Dalam hal ini saya sebagai peneliti perlu menyampaikan fenomena yang saya analisis pada penelitian partisipasi ini antara lain: Adanya ketergantungan masyarakat kabupaten Bangkalan dalam berpartisipasi politik dalam hal memilih dan mendukung yang mengikuti tokoh masyarakat (kyai), Hal ini di sebabkan karena mayoritas masyarakat kabupaten Bangkalan keluaran pondok pesantren, maka demikian masyarakat di kabupaten Bangkalan masih mengikuti arahan kyai untuk ikut serta dalam memilih dan mendukung salah satu calon, yang nantinya akan ditentukan dalam pemilihan presiden yang akan dilangsungkan pada tanggal 17 April di kabupaten Bangkalan.

Sikap politik dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk bila sikap politik tersebut bersifat positif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga akan bersifat positif. Sebaliknya, bila sikap politik yang ditunjukkan bersifat negatif, maka perilaku politik yang ditunjukkan juga bersifat negatif. Positif atau negatifnya suatu sikap politik, tergantung pada beberapa hal, yakni ideologi dari pelaku sikap politik tersebut, organisasi yang menunjukkan sikap politik tersebut, budaya-budaya yang hidup di lingkungan pelaku sikap politik tersebut. Adapun Sikap politik sendiri dapat menentukan hak pilih masyarakat. (Elva R, 2014).

Fenomena yang saya analisis pada penelitian sikap politik antara lain, pertama masyarakat kabupaten Bangkalan, memiliki sikap politik yang cenderung memilih dalam mendukung salah satu kandidat dengan cara menyampaikan visi-misi kandidat terhadap masyarakat lainnya. Kedua masyarakat memiliki sikap politik netral ketidakadanya keberpihakan masyarakat terhadap salah satu kandidat. Sebagian besar masyarakat kabupaten Bangkalan bersikap politik secara aktif sangat dominan, Berdasarkan data KPU daftar pemilih tetap dalam pemilihan presiden di kabupaten Bangkalan Tahun 2019 dan 2014.

Daftar pemilih kabupaten Bangkalan 2019 Jumlah Pemilih laki-laki 416.083 dan Jumlah Pemilih Perempuan 442.984. Total 859.067



Adapun daftar pemilih tetap Kabupaten Bangkalan 2014 terdiri 468.622 laki-laki dan terdiri dari 494.412 Perempuan, jumlah total 963.034.

II. Metode Penelitian

A. Pendekatan Dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan memberikan kesempatan kepada subjek (pemilih pemula) untuk menjawab pertanyaan yang diajukan menurut kerangka berpikir dan pengalaman mereka sendiri, dan bukan berdasarkan patokan-patokan jawaban yang telah dibuat oleh peneliti. (Muslim, 2013). Pendekatan deskriptif kualitatif ini juga bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi dengan pendeskripsian yang teliti untuk menggambarkan secara cermat sifat-sifat suatu hal (individu atau kelompok) yang tidak hanya terbatas pada pengumpulan data melainkan meliputi analisis dan interpretasi. Penelitian ini merupakan pendekatan yang cocok dengan objek yang akan dianalisis sesuai dengan judul yang dipaparkan, dimana objek tersebut merupakan analisis terhadap partisipasi dan sikap politik masyarakat dalam pemilihan presiden di kabupaten Bangkalan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu digunakan penelitian untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, 2 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini terletak di Desa Bandasoleh Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

C. Data Penelitian

Data Penelitian ini ada dua :

1. Data Primer

- a. Kuesioner adalah pengajuan pertanyaan terhadap responden yang mana dalam hal ini peneliti menggunakan koesioner tertutup, yakni sebuah pernyataan yang ditujukan kepada responden untuk menyetujui atau tidaknya pernyataan yang diajukan oleh peneliti.
- b. Wawancara peneliti melakukan tanya jawab terhadap masyarakat terkait dengan partisipasi dan sikap politik dalam pemilihan presiden.

2. Data Sekunder

- a. Data Pendukung dari KPU, mengenai partisipasi dalam pemilihan presiden tahun 2014 dan pemilihan presiden tahun 2019.
- b. Dokumentasi partisipasi dan sikap politik masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Bangkalan, serta dokumentasi berupa foto saat memperoleh kajian peneliti dilapangan, yang berupa tentang partisipasi dan sikap politik masyarakat dalam pemilihan presiden di Kabupaten Bangkalan.

E. Instrumen Penelitian



Instrumen penelitian berupa wawancara dan pernyataan kuesioner tertutup, yang mana peneliti akan menanyakan kepada responden tentang partisipasi dan sikap politik masyarakat dalam pemilihan presiden di Kabupaten Bangkalan.

F. Populasi dan Sampel

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi penelitian ini adalah Masyarakat di Desa Bandasoleh Kecamatan Kokop Masyarakat terdiri dari 1.533 Laki-laki dan 1.562 Perempuan jumlah total 3.095. Masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan presiden.

Sampel adalah sebagian dari populasi itu, Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dari sebagainya (Sugiyono, 2014). Menurut slovin dalam (Indrawan R. Yaniawati P, 2014).

$$n = \frac{N}{\sqrt{N(0,05)^2 + 1}}$$

$$= \frac{3.095}{\sqrt{3.095(0,05)^2 + 1}} = 354,22$$

dibulatkan
Sampel = 354 orang

Tabel 1 Populasi Dan Sampel

Desa Bandasoleh	Jumlah Penduduk	Presentase	Jumlah Sampel
Dusun Ruk garuk	548 penduduk	0.18	0.18 x 354 = 64
Dusun Jerrun	765 penduduk	0.25	0.25 x 354 = 88
Dusun Ngajeteh	789 penduduk	0.25	0.25 x 354 = 88
Dusun Kajer	487 penduduk	0.16	0.16 x 354 = 57
Dusun Cok Pocok	506 penduduk	0.16	0.16 x 354 = 57
Jumlah	3.095 penduduk		354 penduduk

Sumber KPUD Bangkalan 2019.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik propotional *Random Sampling*. Menurut (sugiyono, 2012 : 82) *propotional random sampling* adalah pengambilan data sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Jadi dalam teknik *propotional random sampling* setiap anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang masukkan dalam sampel.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu dengan adanya studi pustakan dan studi lapangan.

1. Studi Pustaka

Pada proses studi pustaka peneliti melakukan pengumpulan data dengan mencari bahan-bahan tertulis dari beberapa buku, jurnal, media, dan dokumen yang dapat menjadi kajian teori untuk skripsi ini.

2. Studi Lapangan

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder sebagai berikut :



- a. Data primer merupakan data yang bersumber dari lapangan dengan wawancara dan angket mendalam terhadap informan yang terkait dengan partisipasi dan sikap politik dalam pemilihan presiden di Kabupaten Bangkalan.
- b. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari dokumentasi, yaitu berupa dokumen, foto, catatan lapangan.

H. Teknik Analisis Data

Hasil data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Analisa data adalah penyederhanaan proses dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipersepsikan. Analisa data dalam penelitian kualitatif digunakan sejak awal sampai proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dicatat dan dikumpulkan untuk dijadikan sebuah catatan lapangan. Langkah-langkah yang digunakan dalam proses analisa data, reduksi data pada proses ini yang telah dilapangan kemudian dikurangi untuk diambil data-data yang diperlukan saja yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Merangkum data, memilih hal-hal yang pokok dengan memfokuskan pada hal-hal yang diperlukan. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan menggunakan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap dalam data penelitian. Selanjutnya penyajian data sekaligus tahap verifikasi pada tahapan ini data-data yang diperlukan yang telah diambil kemudian disajikan sekaligus dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang paling diperlukan yang telah disajikan dalam pembahasa permasalahan pada penelitian ini.

Kemudian yang terakhir pengambilan kesimpulan. Pada tahapan ini penulis mengambil data yang paling diperlukan yang telah disajikan dalam pembahasan pada penelitian ini. Kesimpulan pada tahap akhir peneliti mengutarakan data-data yang telah diperoleh.

III. Hasil penelitian Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Karakter Responden

Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden terdapat beberapa karakteristik responden sebagai berikut:

a. Berdasarkan jenis kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2 Jenis Kelamin Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
Laki-laki	217 orang	61.2%
Perempuan	137 orang	38.8%
Total	354 orang	100%

Sumber: Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terlihat bahwa responen berjumlah 354 orang atau 100%. Dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki berjumlah 217 atau 61.2% Sedangkan responden perempuan berjumlah 137 responden 38.8 % .

b. Berdasarkan tingkat Pendidikan



Berikut adalah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 3 Tingkat Pendidikan Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
SD	131 orang	37.5%
SMP	127 orang	35.4%
SMA	96 orang	27.1%
Total	354 orang	100%

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan pada tabel 2 diatas terlihat bahwa responden yang berjumlah 131 orang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Sebanyak 37% atau 127 orang, sekolah menengah pertama (SMP). Sebanyak 35.4% Dan 96 orang, sekolah Menengah Atas (SMA). Sebanyak 98 orang atau 27.1%.

c. Berdasarkan Mata Pencaharian

Dibawah ini adalah karakteristik responden berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 4 Mata Pencaharian

Keterangan	Jumlah	Persentase
Petani	156 orang	44%
Guru	18 orang	5%
Pelajar/Mahasiswa	62 orang	17.6%
Ibu Rumah Tangga	118 orang	33.4%
Total	354 orang	100%

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan pada tabel 3 diatas bahwa responden dengan mata pencaharian berupa petani sebanyak 156 orang atau 44 %, untuk responden yang berprofesi sebagai guru sebanyak 18 orang atau sebanyak 5% 118 responden atau sebesar 17.6% berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sedangkan selebihnya 33% atau sebanyak 62 orang masih berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa.

d. Berdasarkan Usia

Dibawah ini adalah karakteristik responden berdasarkan usia.

Tabel 5 Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah	Persentase
20	77 orang	21.8%
21-30	183 orang	51.7%
31-40	94 orang	26.5%
Total	354 orang	100%

Sumber: diolah oleh peneliti.

Berdasarkan pada tabel 4 diatas bahwa responden dengan rentan usia kurang dari 20 tahun sebanyak 77 orang atau 21.8%, Sedangkan yang berusia 21 s/d 30 tahun sebanyak 183 orang atau 51.7%, dan sisanya sebanyak 94 orang atau 26.5%, responden yang berusia diatas 30 tahun.

Tabel 6 Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu Presiden Tahun 2019

No	Dusun	Jumlah Pemilih (Dpt)	Pengguna Hak Pilih	Tidak Memilih	Tingkat Partisipasi
1	Ruk Garuh	533	480	53	90 %
2	Jerum	812	731	81	90 %



3	Kajer	513	462	51	90 %
4	Cok Polok	513	462	51	90 %
5	Najajeteh	769	692	771	90 %

Informan penelitian ini terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pilih yaitu telah berumur 17 tahun dan atau telah menikah. Dalam penentuan informan terbagi pada dua jenis informan yaitu informan yang memberikan suara baik dalam pemilihan calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Dalam kaitan dengan pengambilan data dilakukan dalam dua tahapan yaitu pertama dilakukan dengan wawancara terbuka kepada masyarakat (tanpa mengajukan pilihan-pilihan jawaban) dengan pertanyaan “faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih atau tidak memilih”. Jawaban-jawaban masyarakat tersebut berhasil memperoleh 10 faktor. Kemudian atas ke 10 jawaban tersebut dibuatkan kuesioner untuk memperoleh data lanjutan terkait besaran jawaban dari ke 10 faktor tersebut yang untuk selanjutnya dianalisis yang kemudian melahirkan rekomendasi.

Tabel 7 Jawaban Informan Masyarakat Dalam Pemberian Suara Pada Pilpres 2019

No	Presentase	Jawaban Informan
1	24,86 %	Ketertarikan pada visi dan misi capres/ cawapres
2	11,71 %	Telah menerima uang/hadiah dari tim sukses pemenangan capres/cawapres.
3	12,14 %	Permintaan saudara/teman/tim sukses
4	9,32 %	Desakan atasan/pemerintah
5	14,09 %	Kesenangan/simpaty capres
6	10,24 %	Ketertarikan dengan profesi capres/cawapres.
7	11,68 %	Kesamaan partai politik dengan capres/ cawapres
8	9,10 %	Tertarik dengan karya-karya masa lalu capres/ cawapres
9	0 %	Faktor-faktor lain/tidak menjawab

Tabel 8 Jawaban Informan Masyarakat Tidak Memberikan Suara Pada Pilpres 2019

No	Presentase	Jawaban Informan
1	15,39 %	Tidak percaya dengan janji-janji kampanye capres/cawapres
2	16,68 %	Tidak percaya dengan visi dan misi capres/cawapres
3	13,62 %	Tidak terdaftar dalam DPT
4	22,46 %	Tidak mendapat undangan
5	12,21 %	Tidak mendapat uang/hadiah dari tim sukses pasangan
6	10,89 %	Tidak tertarik dengan tim sukses pasangan capres/cawapres
7	12,72 %	Jarak rumah dengan TPS berjauhan
8	0 %	Lebih memilih bekerja
9	0 %	Merasa tidak ada keuntungan bagi dirinya ketika memberikan suara
10	0 %	Merasa tidak ada keuntungan bagi dirinya ketika memberikan suara

B. Pembahasan

Hasil penelitian menyebutkan salah satu faktor masyarakat tidak memberikan suara pada pemilu 2019 disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap calon anggota legislatif baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye, tidak tertarik dengan visi dan misi yang ditawarkan sampai adanya ketidak yakinan masyarakat apakah ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan bagi masyarakat.



Informan menilai bahwa proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) sebagaimana pengalaman beberapa kali Pemilu di Indonesia sangat memperhatikan. Partai politik tampaknya tidak peduli dengan kapasitas maupun profesionalisme caleg pada saat melakukan perekrutan dan yang biasanya dipikirkan adalah besarnya peluang keterpilihan caleg yang bersangkutan. Partai politik termotivasi bahwa kebesaran sebuah partai politik bukan ditentukan pada kuliatas tetapi ditentukan oleh berapa perolehan suara atau kursi yang akan diperoleh dalam sebuah ajang pemilu. Apalagi ada angka-angka politik yang harus dipenuhi dan menjadi target bagi setiap partai politik. Secara nasional papol harus menargetkan harus memperoleh suara dengan angka 3,5 persen sebagai syarat parliament threshold. Partai politik juga harus mati-matian mendapatkan angka 25 persen suara sah nasional sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan partai pada pemilihan presiden (pilpres). Di daerah, parpol berebutan suara untuk mencapai perolehan angka 20 persen kursi di DPRD dan angka 20 persen suara hasil pemilu sebagai syarat untuk mengikuti pencalonan Kepala Daerah tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Dilain hal, partai politik di daerah harus pula berjuang mencari angka suara terbanyak, sebab syarat menjadi pimpinan DPRD adalah parpol peraih angka suara terbanyak.

Ternyata hal inilah yang kemudian menjadi sebab bahwa parpol lebih mengutamakan merekrut masyarakat untuk menjadi caleg yang berpeluang menang meski minim pengalaman kepemimpinan menjadi caleg. Kalau di pusat, kebanyakan yang direkrut adalah para artis dan pengusaha. Kalau di daerah yang paling banyak direkrut adalah keluarga para pejabat di daerah ataupun pengusaha dari luar daerah. Tentu bukan sebuah permasalahan apabila mereka-mereka itu punya kapasitas dan pengalaman kepemimpinan. Tetapi jika merujuk hasil pemilu 2019, pengalaman kepemimpinan dari caleg-caleg terpilih yang berasal dari kerabat pejabat dan pengusaha masih sangat diragukan.

Rekrutmen kader parpol tidak boleh dilakukan dengan tiba saat, tiba akal, tetapi harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan harus didasarkan pada kebutuhan organisasi. Parpol harus menjadikan organisasinya sebagai wadah sekolah politik bagi anggota-anggotanya yang proses pendidikannya harus melewati tahapan rekrutmen yang jelas, pola ujian dan seleksi yang profesional yang pada akhirnya perlu dilakukan promosi anggota untuk jabatan-jabatan publik yang dianggap lulus dalam proses pendidikan politik. Sebagai wadah sekolah politik, parpol harus melewati proses belajar dan mengajar tentang kepemimpinan, etika politik, konflik dan konsensus, pengambilan keputusan dan teknik-teknik berorganisasi lainnya bagi anggota-anggotanya. Agar kelak ketika anggota parpol tersebut terpilih sebagai pejabat publik, mereka telah memiliki bekal kepemimpinan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Selain mengakibatkan masyarakat tidak memilih akibat ketidakpercayaan pada parti politik dan calon, ketidakpercayaan masyarakat juga ternyata menjadi penyebab tingginya modus transaksi atau pemberian hadiah dari calon kepada pemilih.

Oleh sebab itulah persyaratan keanggotaan parpol sangat penting sebagai persyaratan menjadi caleg. Perlu kiranya diusulkan bahwa syarat keanggotaan parpol bagi caleg harus sudah pernah menjadi anggota minimal lima tahun keanggotaan. Masa 5 tahun tersebut harus diisi oleh proses pendidikan politik yang panjang dengan diakhiri sertifikat sebagai bukti keikutsertaan dalam proses pendidikan tersebut. Syarat keanggotaan 5 tahun ini akan membatasi masyarakat yang tiba-tiba menjadi anggota parpol karena ingin memenuhi



persyaratan menjadi caleg. Kemudian mengantisipasi pula fenomena exodus masyarakat dari partai satu ke partai lain saat menjelang pemilu.

Kualitas pemilu akan sangat ditentukan pula oleh kualitas pemilih itu sendiri. Semakin bagus kualitas pemilih maka proses dan hasil pemilu akan semakin berkualitas pula. Pengalaman selama ini bahwa sikap pemilih tidak terpengaruh dengan dengan visi, misi maupun program dari kandidat kepala daerah. Sikap pemilih dalam menentukan pilihan dipengaruhi oleh faktor transaksi, kesamaan kepercayaan, dan kesamaan etnik. Pemilih tidak peduli dengan apa yang dijanjikan kandidat, tetapi tertarik pada aspek finansial dan kekerabatan dengan kandidat.

Penting sekali untuk dilakukan saat ini adalah mencari pola startegi yang ideal dalam rangka pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana memilih anggota legislaif yang ideal dan tentunya strategi itu tidak hanya dilakukan saat menjelang pemilu tetapi sudah harus dilakukan secara reguler jauh sebelum pelaksanaan Pemilu di mulai. Pemilih harus dijarakan apa dampak yang diakibatkan karena salah memilih pemimpin dan bagaimana seharusnya memilih pemimpin daerah yang bermanfaat baginya dan orang lain.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang "Analisis partisipasi dan sikap politik masyarakat dalam pemilihan presiden di Kabupaten Bangkalan", dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Partisipasi masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam pemilihan presiden, masih ada ketergantungan terhadap tokoh agama (kyai), dan keaktifan dalam hal mendukung dan memilih di dominasi laki-laki dari pada perempuan, begitupun dengan sikap politik masyarakat Kabupaten Bangkalan masih ada ketergantungan dalam hal memberikan hak suaranya dalam pemilihan presiden, yang masih menunggu keputusan tokoh agama (kyai). Pemilihan presiden dilangsungkan serentak langsung, umum, bebas, rahasia, dan dilakukan secara jujur dan adil, yang mana dalam hal ini yang berwenang berada di komisi pemilihan umum.

Daftar Pustaka

- Elva R, e. a. (2014). Pengaruh media massa dan sikap politik terhadap partisipasi politik siswa dalam pemilu. 1-11.
- Hendrik, D. (2008). Variabel-variabel yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam pilkada walikota dan wakil walikota padang . 137-148.
- Indrawan R. Yaniawati P. (2014). *Metodologi Penelitian*. Bandung: reflika aditama.
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan partisipasi politik masyarakat (studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan calon wakil presiden di kabupaten minahasa tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSos BudKum Volume 3 Nomor 2*, 14-28.
- Mudjiyanto, B. (2012). *Literasi internet dan partisipasi politik masyarakat pemilih dalam aktifitas pemanfaatan media baru (survey masyarakat pemilih pilkada, kasus masyarakat kota bengkulu)*, 1-16.



Muslim, A. (2013). Faktor-Faktor Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Andir Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur (PILGUB) JABAR 2013 . 1-20.

Pratama, E. G. (2015). Analisis kemenangan joko widodo – jusuf kalla pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 DI kabupaten pelalawan . *Jom Fisip Vol. 2 No. 2*, 1-14.

sugiyono. (2012 : 82). *metode penelitian kuantitatif kualitatif*, 1: 82.

Sugiyono. (2014). *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta Bandung.